



Article

KONTRIBUSI KOMPONEN FISKAL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH : STUDI KASUS PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022-2024

Mutiara Aisyah Putri¹, Siti Khoirina², Nur Salma³

¹ Universitas Mitra Indonesia, Bandar Lampung, Indonesia;
email: mutiaraaisyah724@gmail.com

² Universitas Mitra Indonesia, Bandar Lampung, Indonesia;
email: sitikhoirina@umitra.ac.id

³ Universitas Mitra Indonesia, Bandar Lampung, Indonesia;
email: salma@umitra.ac.id

* Corresponding email: sitikhoirina@umitra.ac.id

ABSTRACT

Local Own-Source Revenue (PAD) is an important indicator in assessing the fiscal independence of a region in financing development. This study aims to analyze the influence of local taxes, local levies, and the general allocation fund on the Local Own-Source Revenue of Bandar Lampung City during the 2022–2024 period. This research employs a quantitative approach using secondary data obtained through documentation and literature review. The results show that partially, local taxes and local levies have a significant effect on Local Own-Source Revenue, while the general allocation fund does not have a significant effect. However, simultaneously, local taxes, local levies, and the general allocation fund have a significant influence on the Local Own-Source Revenue of Bandar Lampung City. These findings indicate that optimizing local taxes and local levies is a key factor in increasing PAD, while the contribution of the general allocation fund to PAD remains relatively limited. This study contributes to enriching the literature on the determinants of local own-source revenue and provides a reference for local governments in formulating policies to increase PAD.

KEYWORDS

Fiscal independence, general allocation fund, local levies, local own-source revenue, local taxes



ABSTRAK

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator penting dalam menilai kemandirian fiskal daerah dalam membiayai pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan dana alokasi umum terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung pada periode 2022–2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, sedangkan dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan. Namun secara simultan, pajak daerah, retribusi daerah, dan dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung. Temuan ini menunjukkan bahwa optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah menjadi faktor penting dalam meningkatkan PAD, sementara kontribusi dana alokasi umum terhadap PAD relatif terbatas. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian mengenai determinan Pendapatan Asli Daerah serta menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan peningkatan PAD.

KATA KUNCI:

Dana Alokasi Umum,
kemandirian fiskal,
pajak daerah,
Pendapatan Asli Daerah,
retribusi daerah

PENDAHULUAN

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, daerah memainkan peran penting dalam bagian integral yang tidak dapat terpisahkan yang memiliki peran dalam menjalankan pemerintahan. Setiap bagian daerah otonomi mereka diberi hak oleh Pemerintah pusat memberikan wewenang kepada mereka untuk mengurus rumah tangga mereka sendiri, sehingga mereka memiliki otonomi untuk mengelola kepentingan lokal. Salah satu tujuan Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat membuat pelayanan publik menjadi lebih baik, Menjadikan penggunaan APBD lebih transparan, munculkan persaingan sehat antar daerah, yang kemudian mendorong lahirnya inovasi-inovasi baru. Agar pemerintah daerah bisa lebih efektif dalam mengelola keuangan, terutama dalam memiliki kemampuan untuk dapat mendanai kegiatan pemerintahan dan proyek pembangunan daerah dalam konteks ini kemandirian pemerintah daerah bisa menjadi tolak diukur untuk menilai kemampuan suatu daerahnya.

Pendapatan asli daerah (PAD) sangat penting bagi keuangan daerah karena menunjukkan seberapa mandiri suatu daerah dalam mengelola anggarannya dengan proporsi pendapatan asli daerah yang lebih tinggi dibandingkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) menunjukkan kapasitas yang lebih tinggi, semakin tinggi daerah yang lebih mandiri secara finansial menunjukkan kapasitasnya yang lebih tinggi untuk mendanai pembangunan dan layanan publik, tanpa terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. sumber utama pendapatan asli daerah (PAD) meliputi: pajak daerah, retribusi daerah, keuntungan dari kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan lain yang diakui secara hukum. (Nadia & Kartika, 2020), Selain pendapatan asli daerah (PAD), dilengkapi dengan dana yang diterima dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan finansial di antara daerah-daerah dalam kerangka desentralisasi dan

distribusi dana untuk kebutuhan daerah. Faktanya dana alokasi umum lebih banyak ditunjukan untuk membiayai belanja pegawai, sebuah isu yang sangat krusial bagi pemerintah daerah. Kebutuhan belanja tidak sejalan dengan prioritas pembangunan dan tuntutan oleh masyarakat. Hal ini menyebabkan fungsi yang dijalankan tidak sejalan dengan hasil kerjanya. (Sari & Wati, 2021)

Tabel 1. Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2022-2024

	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Tahun	Pajak Daerah		Retribusi Daerah	
2022	510.403.804.570	501.500.513.804	17.984.673.209	20.773.605.192
2023	521.032.262.269	545.370.152.592	78.484.673.205	32.823.743.878
2024	588.465.121.520	555.732.059.619	47.867.957.715	23.465.156.969

Sumber: pendapatan daerah kota bandar lampung tahun 2022-2024

Berdasarkan pada tabel 1.1 dapat terlihat pencapaian pajak daerah serta biaya yang terkait dengan retribusi daerah yang ada di Kota Bandar Lampung pada periode 2022–2024. Memberikan gambaran perkembangan pendapatan daerah dalam tiga tahun terakhir. Dari tabel tersebut, terlihat pajak daerah mengalami fluktuasi, dengan nilai tertinggi pada tahun 2024 sebesar 555.732.059.619 dan terendah pada tahun 2022 sebesar 501.500.513.804. mengakibatkan minimnya pengetahuan para wajib pajak serta mengalami

keterlambatan dalam menyelesaikan kewajiban pajak. Begitupun juga retribusi daerah mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar 32.823.743.878 turun menjadi 23.465.156.969 ditahun 2024. Dikarenakan masih rendahnya tarif retribusi dan belum maksimalnya sistem pengawasan terhadap pelaksanaannya. Pemerinta daerah harus meningkatkan keefisienan dalam layanan publik yang menjadi fondasi pengumpulan retribusi agar warga merasa mendapatkan keuntungan yang setara.

Table 2. Data Target dan Realisasi DAU dan PAD Tahun 2022-2024

Tahun	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	DAU		PAD	
2022	1.002.213.665.000	994.485.941.727	905.169.978.533	627.179.307.101
2023	1.056.050.459.000	1.064.924.059.102	1.316.723.312.406	594.676.220.527
2024	1.151.732.113.000	1.149.053.923.976	1.083.177.500.051	716.651.571.797

sumber: pendapatan daerah kota bandar lampung tahun 2022-2024

Seperti yang terlihat pada tabel 1.2 diatas, bahwa antara tahun 2022 dan 2024 realisasi dana alokasi umum (DAU) berubah drastis pada tahun 2022 sebesar 994.485.941.727 meningkat sebesar 1.064.924.059.102 di tahun 2023 begitupun tahun 2024 sebesar 1.149.053.923.976. pemerintah formula penghitungan dana alokasi umum (DAU) berdasarkan indikator seperti jumlah populasi, tingkat kemiskinan, luas daerah, dan indeks harga. Hal ini dapat menyebabkan kenaikan dana alokasi umum secara bertahap.

Pada pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2022 realisasi mencapai sebesar 627.179.307.101 kemudian mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 594.676.220.527 dan kembali meningkat pada tahun 2024 sebesar 716.651.571.797.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurun pada tahun 2023 karena realisasi penerimaan yang lebih rendah pajak dan retribusi daerah, lemahnya aktivitas ekonomi, atau efektivitas pemungutan yang belum optimal sehingga berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

METODE PENELITIAN

Data Kuantitatif adalah jenis data yang nilainya secara nyata biasa diukur dalam bentuk angka atau hitungan, dengan nilai numerik unik yang terkait dengan setiap Teknik pengumpulan data numerik, tipe data ini mendeskripsikan variabel penelitian yang bersifat numerik. (I Made LautMertha Jaya, 2020) Jenis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data sekunder merupakan data yang tidak langsung data data penelitian yang diperoleh tidak berhubungan langsung kepada pengumpul data. Berdasarkan paparan diatas maka sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa catatan atau arsip perusahaan dengan cara membaca, mempelajari dan memahaminya. (sugiyono, 2020) Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan kuantitatif dalam pengumpulan datanya.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri objek /subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (sugiyono, 2020) Populasi dalam penelitian ini adalah laporan realisasi pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah dari tahun 2022 – 2024. Sampel adalah Sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi, sehingga jumlah sampel yang diambil harus dapat mewakili populasi pada penelitian (Sugiyono, 2020). Sampel yang diambil adalah nonprobabilitas, menggunakan teknik purposive sampling. Teknik ini diterapkan saat peneliti memiliki sasaran atau kriteria tertentu terhadap elemen sampel yang ditentukan. (sugiyono, 2020) Sampel dalam penelitian ini adalah laporan realisasi pendapatan tahun 2022 – 2024 atau dikatakan selama 3 tahun dalam data per-bulan, total 36 sampel.

Analisis data yang dilakukan menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan software SPSS versi 16. Pemilihan metode analisis ini didasarkan untuk menguji pengaruh simultan antara variabel independen pajak daerah, retribusi daerah dan dana alokasi umum terhadap variabel dependen pendapatan asli daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini diawali dengan pengujian asumsi klasik untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan telah memenuhi syarat analisis statistik. Uji normalitas dilakukan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov dan diperoleh nilai Asymp. Sig sebesar 0,341 yang lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal sehingga dapat digunakan dalam analisis regresi. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan metode scatterplot antara nilai residual dan nilai prediksi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa titik-titik pada grafik menyebar secara acak, tidak membentuk pola tertentu, serta tersebar di atas dan di bawah sumbu horizontal (nilai 0). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa model regresi tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.

Selain itu, pengujian multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat

hubungan yang kuat antar variabel independen dalam model penelitian. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel pajak daerah memiliki nilai tolerance sebesar 0,525 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) sebesar 1,906. Variabel retribusi daerah memiliki nilai tolerance sebesar 0,494 dan nilai VIF sebesar 2,024, sedangkan variabel dana alokasi umum memiliki nilai tolerance sebesar 0,811 dan nilai VIF sebesar 1,233. Seluruh variabel independen memiliki nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam model regresi. Selanjutnya, hasil uji autokorelasi menunjukkan nilai Durbin-Watson sebesar 1,680 yang berada dalam rentang yang dapat diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi pada model regresi yang digunakan dalam penelitian ini.

Setelah model dinyatakan memenuhi asumsi klasik, analisis selanjutnya dilakukan menggunakan regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan dana alokasi umum terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan hasil analisis diperoleh persamaan regresi yaitu $Y = 14,941 + 0,455X_1 + 22,612X_2 - 0,018X_3 + e$. Nilai konstanta sebesar 14,941 menunjukkan bahwa apabila variabel pajak daerah, retribusi daerah, dan dana alokasi umum bernilai nol, maka pendapatan asli daerah diperkirakan sebesar nilai konstanta tersebut. Koefisien regresi pajak daerah sebesar 0,455 menunjukkan bahwa setiap peningkatan pajak daerah sebesar satu satuan akan meningkatkan pendapatan asli daerah sebesar 0,455. Koefisien regresi retribusi daerah sebesar 22,612 menunjukkan bahwa setiap peningkatan retribusi daerah sebesar satu satuan akan meningkatkan pendapatan asli daerah sebesar 22,612. Sementara itu, koefisien regresi dana alokasi umum sebesar -0,018 menunjukkan bahwa setiap peningkatan dana alokasi umum sebesar satu satuan cenderung menurunkan pendapatan asli daerah sebesar 0,018 dengan asumsi variabel lain tetap.

Tabel 3. Hasil Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien (B)	t hitung	Sig.
Konstanta	14,941	0,349	0,73
Pajak Daerah	0,455	3,326	0,002
Retribusi Daerah	22,612	4,71	0
Dana Alokasi Umum	-0,018	-0,313	0,756

Sumber: Data diolah SPSS 16, 2025

Kemampuan model regresi dalam menjelaskan variabel dependen dapat dilihat melalui koefisien determinasi. Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,743. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel pajak daerah, retribusi daerah, dan dana alokasi umum mampu menjelaskan variasi pendapatan asli daerah sebesar 74,3 persen. Sementara itu, sisanya sebesar 25,7 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan memiliki kemampuan yang cukup kuat dalam menjelaskan perubahan pada variabel pendapatan asli daerah.

Tabel 4. Koefisien Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square
0,874	0,765	0,743

Sumber: Data diolah SPSS 16, 2025

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan melalui uji parsial (uji t) dan uji simultan (uji F). Hasil uji parsial menunjukkan bahwa variabel pajak daerah memiliki nilai t hitung sebesar 3,326 dengan nilai signifikansi sebesar 0,002. Nilai tersebut menunjukkan bahwa t hitung lebih besar dari t tabel sebesar 2,037 dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Variabel retribusi daerah memiliki nilai t hitung sebesar 4,710 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa retribusi daerah juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah karena nilai t hitung lebih besar dari t tabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Sementara itu, variabel dana alokasi umum memiliki nilai t hitung sebesar -0,313 dengan nilai signifikansi sebesar 0,756. Nilai tersebut menunjukkan bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05.

Selain pengujian secara parsial, penelitian ini juga melakukan uji simultan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasil uji simultan menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 34,670 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai tersebut menunjukkan bahwa F hitung lebih besar dari F tabel sebesar 2,87 dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel pajak daerah, retribusi daerah, dan dana alokasi umum secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa ketiga variabel independen dalam penelitian ini secara bersama-sama memiliki kontribusi dalam menjelaskan variasi pendapatan asli daerah.

Tabel 5. Hasil Uji Simultan

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	1.081.269.701	3	360.423.234	34.670	0.000
Residual	332.668.928	32	10.395.904		
Total	1.413.938.629	35			

Sumber: Data diolah SPSS 16, 2025

Bagaimana Pajak Daerah Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2022-2024

Berdasarkan hasil pengujian statistik, pajak daerah terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung. Hal ini ditunjukkan oleh hasil uji parsial (uji t) yang memperoleh nilai t hitung sebesar 3,326 yang lebih besar dari t tabel sebesar 2,037 dengan nilai signifikansi sebesar 0,002 yang lebih kecil dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan pajak daerah secara langsung diikuti oleh peningkatan PAD. Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap PAD dapat diterima.

Secara konseptual, pajak daerah merupakan salah satu komponen utama dalam struktur Pendapatan Asli Daerah yang bersifat wajib bagi masyarakat dan badan usaha yang berada dalam wilayah administrasi pemerintah daerah. Oleh karena itu, keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola dan memaksimalkan potensi pajak daerah akan berdampak langsung pada peningkatan kapasitas fiskal daerah. Peningkatan penerimaan

pajak daerah dapat mencerminkan semakin optimalnya kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak, memperluas basis pajak, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kondisi tersebut pada akhirnya akan memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.

Selain itu, meningkatnya penerimaan pajak daerah juga menunjukkan adanya aktivitas ekonomi yang relatif berkembang di daerah tersebut. Aktivitas ekonomi yang meningkat, seperti pertumbuhan sektor perdagangan, jasa, maupun properti, secara tidak langsung akan meningkatkan potensi penerimaan pajak daerah seperti pajak restoran, pajak hotel, pajak reklame, maupun pajak bumi dan bangunan sektor perkotaan. Dengan demikian, pajak daerah tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan daerah, tetapi juga menjadi indikator perkembangan ekonomi daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh I Putu dan Gade (2020) yang menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Bandung. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi penerimaan pajak daerah, maka semakin besar pula kemampuan daerah dalam meningkatkan PAD. Hal ini memperkuat argumen bahwa pajak daerah memiliki peran strategis dalam mendukung kemandirian fiskal daerah serta mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Bagaimana Retribusi Daerah Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2022-2024

Hasil penelitian menunjukkan bahwa retribusi daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung. Hal ini ditunjukkan oleh hasil uji parsial yang memperoleh nilai t hitung sebesar 4,710 yang lebih besar dari t tabel sebesar 2,037 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan retribusi daerah secara nyata dapat meningkatkan PAD. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh terhadap PAD dapat diterima.

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang berasal dari pembayaran masyarakat atas jasa atau layanan tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Penerimaan retribusi biasanya berasal dari jasa umum, jasa usaha, serta perizinan tertentu yang diberikan kepada masyarakat maupun pelaku usaha. Oleh karena itu, besarnya penerimaan retribusi daerah sangat dipengaruhi oleh tingkat aktivitas masyarakat serta kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Meskipun kontribusi retribusi daerah umumnya tidak sebesar pajak daerah, namun pengelolaan retribusi yang efektif dapat menjadi sumber pendapatan yang stabil bagi pemerintah daerah. Peningkatan kualitas layanan publik seperti pengelolaan pasar, terminal, parkir, maupun perizinan usaha dapat mendorong meningkatnya penerimaan retribusi daerah. Sebaliknya, apabila pengelolaan retribusi tidak dilakukan secara optimal, maka potensi penerimaan daerah dapat mengalami kebocoran atau tidak terealisasi secara maksimal.

Permasalahan dalam pengelolaan retribusi daerah sering kali berkaitan dengan lemahnya pengawasan serta praktik penyimpangan dalam proses pemungutan retribusi.

Sebagai contoh, dalam beberapa kasus sering ditemukan permasalahan terkait pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum atau di pasar tradisional yang tidak sepenuhnya masuk ke kas daerah. Kondisi tersebut dapat menyebabkan potensi penerimaan retribusi daerah tidak tercatat secara optimal dalam laporan keuangan daerah. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan retribusi yang lebih transparan, akuntabel, serta didukung oleh pengawasan yang efektif.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh I Putu dan Gade (2020) yang menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Bandung. Penelitian tersebut menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik dan efektivitas sistem pemungutan retribusi dapat berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan daerah.

Bagaimana Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Dana Alokasi Umum Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2022-2024

Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung sebesar $-0,313$ yang lebih kecil dari t tabel sebesar $2,037$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,756$ yang lebih besar dari $0,05$. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap PAD tidak dapat diterima.

Secara teoritis, Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Dana ini diberikan untuk membantu daerah dalam membiayai kebutuhan umum pemerintahan serta mengurangi ketimpangan fiskal antara daerah yang memiliki kemampuan keuangan tinggi dan daerah yang memiliki kemampuan keuangan rendah. Oleh karena itu, DAU tidak secara langsung ditujukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Tidak signifikannya pengaruh DAU terhadap PAD menunjukkan bahwa dana transfer dari pemerintah pusat tidak memiliki hubungan langsung dengan peningkatan pendapatan yang bersumber dari potensi ekonomi daerah. PAD pada dasarnya lebih dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri, seperti pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan kata lain, meskipun DAU dapat membantu stabilitas keuangan daerah, namun dana tersebut tidak secara langsung meningkatkan penerimaan PAD.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maharani et al. (2025) yang menyatakan bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa DAU lebih berfungsi sebagai instrumen pemerataan fiskal daripada sebagai faktor yang secara langsung meningkatkan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan asli daerah.

Bagaimana Dana Alokasi Umum Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2022-2024

PAD merupakan sumber utama untuk meningkatkan pendapatan daerah yang dapat digunakan oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan

daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana pemerintah pusat. Pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Untuk menuju otonomi daerah, maka pengelolaan peningkatan pendapatan asli daerah perlu semakin diintensifkan, agar tercapainya keseimbangan antara pelaksana tugas - tugas pemerintahan dan pembangunan serta dapat mendukung terciptanya aparat yang bersih dan bertanggung jawab. (I Putu dan Gede, 2020)

Berdasarkan hasil penelitian uji statistik menunjukkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah dan dana alokasi umum memiliki nilai signifikasi sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai $F_{hitung} 34,670 < F_{tabel} 2,90$. Maka hasil penelitian ini menunjukan variabel pajak daerah (X_1), retribusi daerah (X_2), dan dana alokasi umum (X_3) secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel pendapatan asli daerah (Y). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun DAU tidak signifikan secara parsial, namun dalam konteks simultan, ketiga variabel ini tetap memberikan kontribusi terhadap dinamika PAD. pentingnya strategi antara penerimaan asli dan transfer pusat dalam mendukung keuangan daerah. Dalam konteks perencanaan anggaran, pemerintah daerah perlu menjaga keseimbangan antara optimalisasi PAD dan pengelolaan dana transfer agar tidak terjadi ketergantungan yang berlebihan. menunjukkan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi dan sinergis antar sumber pendapatan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Denna Aprilla Ardiyanti, 2022) hasil dari studi tersebut menunjukkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh simultan dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah provinsi jawa barat. Hal ini menunjukan bahwa keseluruhannya merupakan komponen utama penerimaan yang memperkuat kapasitas fiskal daerah. Hal ini menegaskan bahwa optimalisasi pemungutan dan pengelolaan setiap komponen menjadi faktor penting dalam meningkatkan kemandirian fiskal pemerintah daerah.

Sinergi Pajak, Retribusi, dan DAU: Sebuah Tinjauan Teoretis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung, sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap PAD. Namun demikian, secara simultan ketiga variabel tersebut terbukti berpengaruh signifikan terhadap PAD. Temuan ini dapat dianalisis menggunakan perspektif teori desentralisasi fiskal dan teori keuangan publik yang menjelaskan bagaimana pemerintah daerah mengelola sumber-sumber pendapatan untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.

Dalam perspektif teori desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sumber-sumber keuangan daerah secara mandiri guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Menurut Oates (1999), desentralisasi fiskal memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih efektif dalam menyediakan layanan publik karena pemerintah daerah memiliki informasi yang lebih baik mengenai kebutuhan masyarakat lokal. Oleh karena itu, sumber pendapatan yang berasal dari daerah seperti pajak

daerah dan retribusi daerah menjadi komponen penting dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD menunjukkan bahwa Kota Bandar Lampung mampu memanfaatkan sumber pendapatan lokal sebagai instrumen utama dalam meningkatkan pendapatan daerah. Hal ini sejalan dengan konsep desentralisasi fiskal yang menekankan pentingnya optimalisasi sumber pendapatan lokal untuk memperkuat kemandirian keuangan daerah.

Sementara itu, tidak signifikannya pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap PAD juga dapat dijelaskan melalui teori desentralisasi fiskal. Dana Alokasi Umum pada dasarnya merupakan dana transfer dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah. Oleh karena itu, dana ini tidak dirancang secara khusus untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, melainkan untuk membantu daerah dalam membiayai kebutuhan dasar pemerintahan dan pelayanan publik. Dengan demikian, meskipun DAU memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas fiskal daerah, namun dana tersebut tidak secara langsung mempengaruhi kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan asli daerah.

Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijelaskan melalui teori keuangan publik yang dikemukakan oleh Musgrave. Dalam teori ini dijelaskan bahwa pemerintah memiliki tiga fungsi utama dalam kebijakan fiskal, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Fungsi alokasi berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa publik kepada masyarakat, yang dalam konteks pemerintah daerah dibiayai melalui penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Temuan penelitian yang menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD menunjukkan bahwa kedua sumber pendapatan tersebut memiliki peran penting dalam mendukung fungsi alokasi pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan publik.

Lebih lanjut, dalam perspektif teori keuangan publik, dana transfer seperti Dana Alokasi Umum berfungsi sebagai instrumen untuk menjalankan fungsi distribusi dan stabilisasi fiskal antar daerah. DAU diberikan untuk membantu daerah yang memiliki kapasitas fiskal rendah agar tetap mampu menyediakan layanan publik yang memadai bagi masyarakatnya. Oleh karena itu, tidak signifikannya pengaruh DAU terhadap PAD dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dana tersebut lebih berfungsi sebagai mekanisme pemerataan fiskal daripada sebagai sumber peningkatan pendapatan asli daerah.

Secara simultan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, dan dana alokasi umum bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung. Temuan ini menunjukkan bahwa struktur keuangan daerah tidak hanya bergantung pada satu sumber pendapatan saja, melainkan merupakan kombinasi dari berbagai sumber penerimaan daerah. Dalam perspektif teori desentralisasi fiskal dan teori keuangan publik, kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang efektif memerlukan keseimbangan antara optimalisasi sumber pendapatan lokal dan pemanfaatan dana transfer dari pemerintah pusat. Dengan demikian, pemerintah daerah perlu terus meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber utama PAD, sekaligus memanfaatkan dana transfer dari pemerintah pusat secara efisien untuk mendukung pembangunan daerah.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan dana alokasi umum terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung Tahun 2022–2024. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, diketahui bahwa pajak daerah dan retribusi daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kedua sumber pendapatan tersebut memiliki peran penting dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Sementara itu, dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, yang menunjukkan bahwa dana transfer dari pemerintah pusat tidak secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan PAD. Namun demikian, secara simultan pajak daerah, retribusi daerah, dan dana alokasi umum terbukti berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen yaitu pajak daerah, retribusi daerah, dan dana alokasi umum, sehingga masih terdapat kemungkinan adanya variabel lain yang dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah namun tidak dimasukkan dalam model penelitian. Kedua, periode penelitian yang digunakan relatif terbatas, yaitu hanya mencakup tahun 2022–2024, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan kondisi dalam jangka waktu yang lebih panjang. Keterbatasan tersebut dapat mempengaruhi tingkat generalisasi hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang ada, beberapa rekomendasi dapat diajukan. Pemerintah daerah diharapkan dapat terus mengoptimalkan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber utama Pendapatan Asli Daerah melalui peningkatan efektivitas pemungutan serta perbaikan sistem administrasi keuangan daerah. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang berpotensi mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah serta menggunakan periode penelitian yang lebih panjang agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan daerah

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanti, A. D. (2023, September 14). *Kebijakan fiskal daerah dalam rangka pemerataan dan kemandirian pemerintahan daerah*. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Diambil dari <https://setkab.go.id/kebijakan-fiskal-daerah-dalam-rangka-pemerataan-dan-kemandirian-pemerintahan-daerah/>
- Indriani, I. (2022). Kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Berau. *ECO-BUILD: Economy Bring Ultimate Information All About Development Journal*, 6(1), 25–30. <https://doi.org/10.35915/ej.v6i1.669>
- Jaya, I. M. L. M. (2020). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*. Yogyakarta, Indonesia: Anak Hebat Indonesia.
- Kementerian Keuangan. (2014). *Kajian kinerja fiskal daerah otonom baru (DOB)*. Diambil dari <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2014/03/28/143552684736385-kajian-kinerja-fiskal-daerah-otonom-baru-dob>
- Khoirina, S. (2025). Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja modal pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung tahun 2019–2023. *Business and Entrepreneurship Journal (BEJ)*, 6(2). <https://doi.org/10.57084/bej.v6i2.2005>
-

- Kumalasari, R., & Samudra, G. (2025). Pengaruh pajak dan retribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Magelang tahun 2011-2023. *Jurnal Jendela Inovasi Daerah*, 8(1), 1–21. <https://doi.org/10.56354/jendelainovasi.v8i1.215>
- Santika, E., Anwar, A., & Isabella, A. A. (2024). Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap belanja daerah Provinsi Lampung. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(6), 2737–2748. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i6.5427>
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan kombinasi (mixed methods)* (Cetakan ke-10). Bandung, Indonesia: Alfabeta.
- Suprpto, S., & Purbowati, R. (2024). Kontribusi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap pendapatan asli daerah (PAD). *Jurnal Akuntansi Neraca*, 2(1). <https://doi.org/10.59837/jan.v2i1.28>
- Suryahadi, M. Y., & Santosa, A. B. (2024). Analisis kemampuan keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan otonomi daerah tahun 2018-2022. *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING)*, 7(4), 1060–1071. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i5.11672>
- Syaifullah. (2024). Analisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Sumatera Utara. *Jurnal Akutansi Manajemen Ekonomi Kewirausahaan (JAMEK)*, 4(3), 426–438. <https://doi.org/10.47065/jamek.v4i3.1892>
- Tahar, A., & Zakhiya, M. (2011). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap kemandirian daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah. *Journal of Accounting and Investment*, 12(1), 88–99.
- Usman, R. (2017). Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD). *JAF (Journal of Accounting and Finance)*, 1(1), 87–103. <https://doi.org/10.25124/jaf.v1i01.902>
- Wiguna, K. A., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah terhadap kinerja keuangan daerah. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(1), 85–108. <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v28.i01.p04>
-